

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**



SKPD KECAMATAN KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Kecamatan Kebumen berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kebumen Tahun 2021.

Laporan ini disusun dengan maksud untuk mengukur tingkat capaian kinerja OPD Kecamatan Kebumen mulai dari perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi OPD, melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dan Sub Bagian yang ada di OPD Kecamatan Kebumen sehingga dapat tercapai tingkat kinerja yang optimal.

Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini dapat membantu dalam mewujudkan tingkat capaian kinerja yang optimal dari semua unsur pelaksana tugas yang ada di OPD Kecamatan Kebumen sehingga Visi dan Misi OPD dapat terwujud.

Kebumen, Januari 2022

Camat Kebumen
Kabupaten Kebumen



SUIS IDAWATI, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670531 198603 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Perencanaan Kinerja	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	25
BAB IV Penutup	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selain itu Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ; dan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan tugas, camat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 3) Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- 4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 7) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- 8) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- 10) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- 11) Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 12) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya;
- 13) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- 14) Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;

3. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan ;
5. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;
6. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan ;
9. Koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan ;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Desa/kel. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan ;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa/kel ;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya ;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kel di tingkat kecamatan;
- 8) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kel;
- 9) Pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 10) Administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- 11) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan ;
- 12) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan ;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang keamanan dan ketertiban ;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik ;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu ;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggung jawabnya ;

- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di tingkat Desa/kel ;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban ;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya ;
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat ;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkungan kecamatan ;

- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kel, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil ;
- 9) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Tugas tersebut dijabarkan dengan beberapa fungsi, antara lain :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial ;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kesehatan ;
- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial ;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya ;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

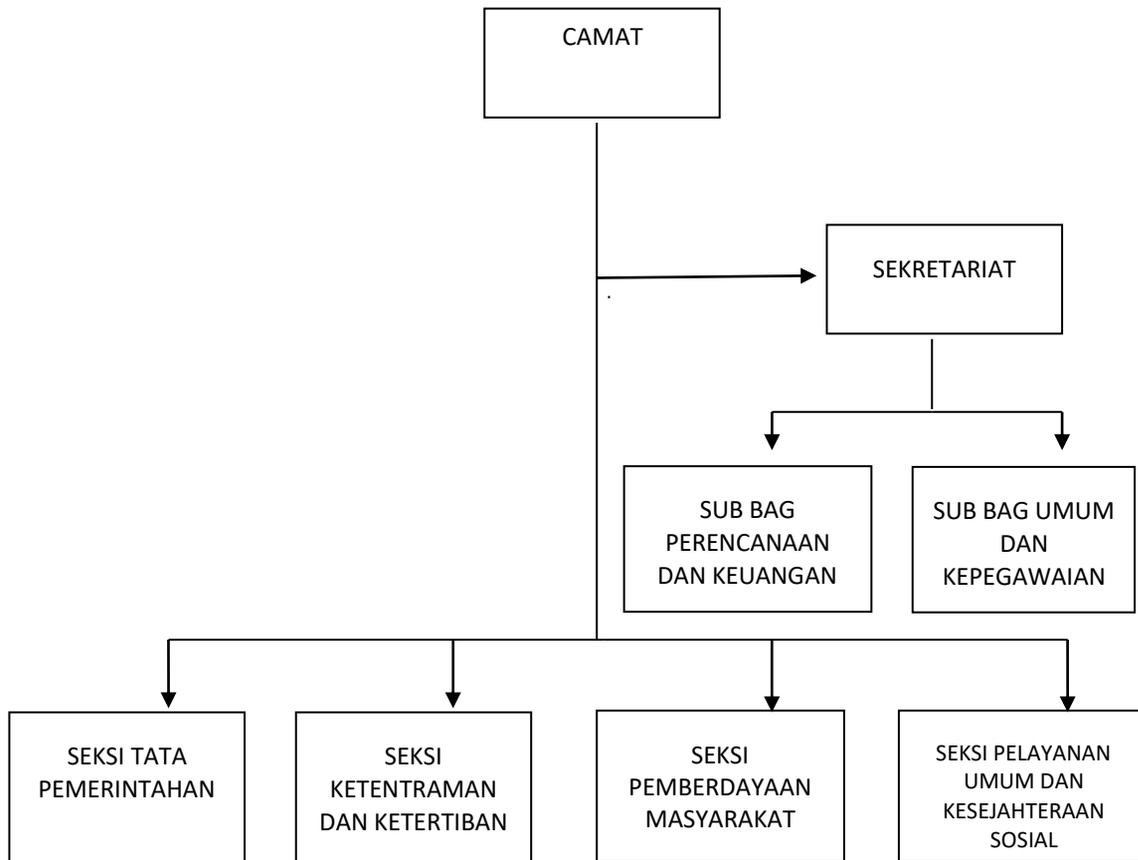
g. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, susunan Organisasi Kecamatan Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

- a) Camat
- b) Sekretariat Kecamatan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Seksi Tata Pemerintahan
- d) Seksi Ketertaman dan Ketertiban
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
SESUAI PERDA NO 15 TAHUN 2008.**



Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris	1					1
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		1				1
4.	Sub Bagian Umum & Kepegawaian		1				1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	1					1
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1				1
7.	Seksi Tramtib	1					1
8.	Seksi Pelayanan Umum & Kesos	1					1
9.	Pejabat Fungsional Umum		1	2		5	8
Jumlah		5	4	2		5	16

Sumber : Kepegawaian Kec. KEBUMEN Th. 2021

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Kebumen dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah golongan IV (5 Orang), Golongan III (4 Orang), dan Golongan II (2 Orang), sisanya adalah tenaga non PNS/THL sebanyak 5 orang.

1.2. Fungsi Strategis

Untuk mendukung visi dan misi Kecamatan Kebumen yang telah ditetapkan maka tujuan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Kebumen yaitu :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan kegiatan perbidang.
- b. Menyusun program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan Desa perbidang.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal perbidang.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit Kerja pemerintah maupun swasta.
- g. Melaksanakan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan dan kelautan, perekonomian, masyarakat Desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah.

Adapun Sasaran Guna mendukung tujuan kecamatan di atas, antara lain :

- a. Adanya dokumen perencanaan program kegiatan yang matang yang dihasilkan melalui prosedur
- b. Adanya Standar Operasional Publik untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. Terciptanya suatu koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat;

- d. Terlaksananya pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- f. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Indikator yang disusun untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana memadai, dengan indikator sasarannya;
2. Jumlah bulan surat yang terdistribusikan;
3. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik;
4. Jumlah bulan jasa perizinan kendaraan dinas operasional;
5. Jumlah bulan jasa administrasi keuangan;
6. Jumlah bulan jasa kebersihan kantor;
7. Jumlah bulan jasa perbaikan peralatan kerja;
8. Jumlah bulan alat tulis kantor;
9. Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan;
10. Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Jumlah bulan bahan bacaan dan perundang-undangan;
12. Jumlah bulan makanan dan minuman;
13. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
15. Jumlah paket pengadaan mebeler
16. Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor;
17. Jumlah bulan rutin/berkala rumah dinas;
18. Jumlah bulan rutin/berkala gedung kantor;
19. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala mebeler.
20. Jumlah Dokumen penyusunan dokumen perencanaan berupa, Renja, Renstra, RKA, DPA, Lakip dan laporan keuangan.

21. Jumlah dokumen RKP Kecamatan hasil penyelenggaraan Musrenbangcam an RKP
22. Jumlah desa tersusun data IPMD
23. Jumlah desa/kel terfasilitasi TKP2Kdes/Kel
24. Jumlah bulan terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
25. Jumlah kegiatan peringatan Hari jadi Kebumen dan hari besar kebangsaan.
26. Jumlah bulan persiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
27. Jumlah Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, terselenggaranya kegiatan HUT RI
28. Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
29. Jumlah desa terfasilitasi pemilihan kepala desa/perangkat desa.
30. Jumlah desa terfasilitasi Alokasi Dana Desa
31. Jumlah desa Penyusunan dan pelaksanaan APBDes.
32. Jumlah Kegiatan penyelenggaran pembinaan PKK.
33. Jumlah desa/kel tersusun database dan profil desa/kel

Strategi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah beisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Kebumen daalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS.
3. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan nilai guna potensi infastruktur jalan dan jembatan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam embangun kelurahan.
6. Menciptakan pengelolaan sampah dengan baik dalam rangka meningkatkan K 3 di lingkungan masyarakat

7. Melaksanakan program e-KTP.
 - a. Internal

Melakukan konsultasi dengan pimpinan kecamatan Kebumen. Pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hirarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap “ SOP” dan pembuatan lembaran uraian tugas).
 - b. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan atau konsultasi dengan pemerintah Kecamatan Kebumen, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah
 - c. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjejaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk figur
8. Menegaskan sistem dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Optimalisasi adanya sumber daya guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Kebumen;
10. Meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dalam memperlancar penyelenggaraan kecamatan;
11. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelesatrian hasil-hasil pembangunan;
12. Mendorong instansi terkait untuk selalu konsisten dan komitmen terhadap hasil kesepakatan tingkat Kecamatan Kebumen melalui mekanisme musrenbang kecamatan;
13. Memperlancar jalinan komunikasi dan koordinasi baik antara kecamatan dengan instansi terkait atau antar instansi terkait dengan program yang ada di Kecamatan Kebumen;
14. Melaksanakan program E KTP

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan;
2. Penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Menetapkan Standar Operasional Publik dalam pelayanan prima;
4. Penguatan koordinasi baik internal dan eksternal melalui Konfrensi Sekdes dan Kades;
Pembentukan tim pembina, pengawas, monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayana Kecamatan Kebumen antara lain :

1. Permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan kebumen yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur kelurahan adalah sebagai berikut;
2. Adanya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersediannya dukungan dari berbagai pihak.
3. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
4. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor sehingga pelayanan terhadap masyarat terhambat;
5. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
7. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah.
8. Munculnya pandemi covid-19 yang membuat beberapa anggaran kegiatan harus dirasionalisasi, beberapa personil terpapar covid, serta protokol kesehatan yang mengharuskan beberapa kegiatan masih terkendala.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Kebumen Tahun 2021–2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebumen. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Kebumen. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Kebumen sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

a. VISI

Kecamatan Kebumen memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

b. MISI

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kmandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak

pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. Go-lak yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. Satu data untuk semua
3. Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
4. Keris Patih = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
5. Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)
6. Festival Anggaran, keterbukaan unformasi publik
7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
9. Kepenak = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
10. Bu Desi = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi smart city
11. Tempe Manist, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
12. Kaya Maselin, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
13. Permissi, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
14. Tariyan, program tiada hari tanpa pelayanan
15. Yan Jempot, program pelayanan jemput bola
16. Pentas, program peningkatan kapasitas ASN
17. Wament, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Kebumen lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Kebumen harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja disusun berdasar sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sbb:

1. Sasaran strategis meningkatnya capaian Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Desa dengan indikator antara lain:
 - a. Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun;
 - b. Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah;
 - d. Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah;

- f. Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
2. Sasaran Strategis meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dengan indikator prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang semakin baik;
3. Sasaran strategis meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kelurahan dengan indikator jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan yang terlaksana;
4. Sasaran strategis indeks kondusifitas kecamatan, dengan indikator Jumlah Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana
5. Sasaran strategis meningkatnya indek desa membangun, dengan indikator jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan lebih baik

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi	61,33 indeks	61,33 indeks	63,33 indeks	65,33 indeks	67,33 indeks	69,33 indeks
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00 indeks	83,00 indeks	84,00 indeks	85,00 indeks	85,50 indeks	86,00 indeks
Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8 dok	12 dok	15	15	15	15
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	3 dok	7 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bn	12	12	12	12	12
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	50 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	12 bln	11 bln	11 bln	11 bln	11 bln
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	9 paket	73 unit	95 unit	94 unit	94 unit	94 unit

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah unit Pengadaan mebel	0	49 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit
Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1 unit	8 unit	20 unit	18 unit	18 unit	20 unit
Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	0	16 unit	25 unit	26 unit	26 unit	24 unit
Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	46 unit	72 unit	72 unit	72 unit	72 unit	72 unit
Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	10 unit	29 unit	29 unit	29 unit	29 unit	29 unit
Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	5 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit
Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	90%	91%	91%	92%	92%	92%
Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	90%	91%	91%	92%	92%	92%
Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	8 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kelurahan		89%	90%	91%	91%	91%
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan di wilayah kecamatan		4 keg				
Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel		10 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen		58 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket
Jumlah Kelurahan yang mendapat fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen		5 kel				

1. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	TRIWULAN			
					I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kinerja layanan Pemerintahan	- Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	100 % A	100 % A	21 %	31 %	27 %	21 % A
2.	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %	100 %	45 %	12 %	35 %	8 %
3.	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	100 %	100 %	-	1 %	99 %	-
4	Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan Kemiskinan	100 %	100 %	8 %	82 %	7 %	3 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.300.473.000	5.474.594.000	Penambahan di anggaran Tambahan Penghasilan PNS, Pengurangan anggaran di kegiatan Pengadaan BMD serta Pemeliharaan BMD untuk Kegiatan Penanganan Covid-19
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70.710.000	70.710.000	
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	33.691.000	Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.848.000	4.848.000	Pergeseran dari belanja makan minum untuk belanja umbul-umbul dan bendara
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	146.310.000	146.310.000	ada pergeseran anggaran belania dari kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Besaran anggaran belanja daerah yang dikelola Kecamatan Kebumen pada tahun 2021 adalah Rp. 5.730.153.000,- Terealisasi sebesar Rp. 4.716.744.023,- atau 82,31%. Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan, sebagian besar telah terlaksana 100%. Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Keuangan			Fisik		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	9.635.000	9.388.800	97,44	8 dok	8 dok	100
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5.450.000	5.256.000	96,44	5 dok	5 dok	100
Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4.185.000	4.132.800	98,75	3 dok	3 dok	100
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.303.618.000	4.306.650.099	81,20	12 bn	12 bn	100
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	5.289.378.000	4.293.181.699	81,17	50 orang	40 orang	80
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	14.240.000	13.468.400	94,58	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	49.360.000	48.859.300	98,99	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor	7.000.000	6.997.500	99,96	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	10.000.000	9.504.000	95,04	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	9.000.000	9.000.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	3.600.000	3.600.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	19.760.000	19.757.800	99,99	12 bln	12 bln	100
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	5.500.000	100,00	9 paket	9 paket	100
Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	5.500.000	5.500.000	100,00	1 unit	1 unit	100
Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	58.531.000	50.647.224	86,53	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	1.531.000	1.520.000	99,28	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	16.128.324	67,20	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	33.000.000	32.998.900	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	47.950.000	44.657.500	93,13	46 unit	46 unit	100
Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprerasional	28.000.000	24.928.500	89,03	29 unit	29 unit	100
Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.820.000	98,20	5 unit	5 unit	100

Indikator Kinerja	Keuangan			Fisik		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	9.950.000	9.909.000	99,59	12 unit	12 unit	100
Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	70.710.000	70.500.000	99,70	90%	90%	100
Jumlah pelayanan perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	8.750.000	8.684.000	99,25	1 jenis	1 jenis	100
Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	61.960.000	61.816.000	99,77	7 jenis	7 jenis	100
Prosentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.691.000	30.622.300	90,89	100	100	100
Jumlah bulan tercukupinya penyelenggaraan koordinasi forkompincam di Kecamatan Kebumen	33.691.000	30.622.300	90,89	9 bln	9 bln	100
Jumlah Kegiatan penyelenggaraapemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	4.848.000	4.817.000	99,36	2 keg	2 keg	100
Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	4.848.000	4.817.000	99,36	2 keg	2 keg	100
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	146.290.000	145.101.800	99,19	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100
Jumlah desa/kel yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	28.485.000	28.213.700	99,05	24 desa	24 desa	100
Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	10.560.000	10.475.100	99,20	2 dok	2 dok	100
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	18.715.000	18.472.500	98,70	1 jenis	1 jenis	100
Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	32.810.000	32.494.600	99,04	30 keg	30 keg	100
Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	46.140.000	45.936.000	99,56	6 keg	6 keg	100
jumlah desa yang di rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1.300.000	1.290.000	99,23	24 desa	24 desa	100
Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel	8.280.000	8.219.900	99,27	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100

Capaian terendah adalah pada gaji dan tunjangan ASN hal ini disebabkan banyaknya personil di lingkungan Kecamatan Kebumen yang memasuki masa usia pensiun sehingga realisasi mengalami penurunan yang signifikan. Sementara untuk kegiatan yang lain ada beberapa yang mengalami perubahan akibat masih adanya pandemi covid-19. Beberapa kegiatan yang harus difocusing untuk kegiatan tersebut adalah di pemeliharaan gedung dan bangunan serta pengadaan mebel dan pengadaan mesin.

3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2020

Di tahun 2020 seluruh kegiatan tercapai 100 % sedangkan di tahun 2021 ada 1 sub kegiatan yang tidak mencapai 100% yaitu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang hanya mencapai 80%. Hal ini disebabkan karena mutasi pegawai dilingkungan Kecamatan Kebumen. Di tahun 2021 ada 6 orang PNS yang pension. Di bulan September terdapat mutasi di lingkungan Kecamatan Kebumen yang mengakibatkan beberapa orang mutasi keluar dan baru diisi di bulan Oktober dan akhir Desember 2021.

Indikator Kinerja	TAHUN 2021						TAHUN 2020					
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	9.635.000	9.388.800	97,44	8 dok	8 dok	100	31.728.000	30.582.000	96,39	8 dok	8 dok	100
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5.450.000	5.256.000	96,44	5 dok	5 dok	100	16.000.000	15.860.000	99,13	5 dok	5 dok	100
Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4.185.000	4.132.800	98,75	3 dok	3 dok	100	15.728.000	14.722.000	93,60	3 dok	3 dok	100
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.303.618.000	4.306.650.099	81,20	12 bn	12 bn	100	4.934.660.000	4.715.064.212	95,55	12 bn	12 bn	100
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	5.289.378.000	4.293.181.699	81,17	50 orang	40 orang	80	4.890.160.000	4.670.564.212	95,51	50 orang	50 orang	100
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	14.240.000	13.468.400	94,58	12 bln	12 bln	100	44.500.000	44.500.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	49.360.000	48.859.300	98,99	12 bln	12 bln	100	46.990.000	46.990.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor	7.000.000	6.997.500	99,96	12 bln	12 bln	100	5.000.000	5.000.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	10.000.000	9.504.000	95,04	12 bln	12 bln	100	21.780.000	21.780.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100,00	12 bln	12 bln	100	8.000.000	8.000.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	3.600.000	3.600.000	100,00	12 bln	12 bln	100	3.000.000	3.000.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	19.760.000	19.757.800	99,99	12 bln	12 bln	100	8.000.000	8.000.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah							.210.000	1.210.000	100,00	12 bln	12 bln	100

Indikator Kinerja	TAHUN 2021						TAHUN 2020					
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	5.500.000	100,00	9 paket	9 paket	100	33.800.000	33.514.000	99,15	2 paket	2 paket	100
Jumlah unit Pengadaan mebel							3.750.000	3.403.000	90,75	1 Paket	1 Paket	100
Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	5.500.000	5.500.000	100,00	1 unit	1 unit	100	33.800.000	33.514.000	99,15	1 Paket	1 Paket	100
Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	58.531.000	50.647.224	86,53	12 bln	12 bln	100	41.174.000	34.429.000	83,62	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	1.531.000	1.520.000	99,28	12 bln	12 bln	100	2.499.000	2.499.000	100,00	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	16.128.324	67,20	12 bln	12 bln	100	18.000.000	11.268.000	62,60	12 bln	12 bln	100
Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	33.000.000	32.998.900	100,00	12 bln	12 bln	100	20.675.000	20.662.000	99,94	12 bln	12 bln	100
Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	47.950.000	44.657.500	93,13	46 unit	46 unit	100	64.631.000	57.110.000	88,36	46 unit	46 unit	100
Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional	28.000.000	24.928.500	89,03	29 unit	29 unit	100	28.000.000	20.539.000	73,35	29 unit	29 unit	100
Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.820.000	98,20	5 unit	5 unit	100	17.080.000	17.020.000	99,65	5 unit	5 unit	100
Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	9.950.000	9.909.000	99,59	12 unit	12 unit	100	19.551.000	19.551.000	100,00	12 unit	12 unit	100
Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	70.710.000	70.500.000	99,70	90%	90%	100	111.134.000	99.700.000	89,71	90%	90%	100
Jumlah pelayanan perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	8.750.000	8.684.000	99,25	1 jenis	1 jenis	100	14.058.000	13.355.000	95,00	1 jenis	1 jenis	100
Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	61.960.000	61.816.000	99,77	7 jenis	7 janis		97.076.000	86.345.000	88,95	7 jenis	7 janis	
Prosentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.691.000	30.622.300	90,89	100	100	100						
Jumlah bulan tercukupinya penyelenggaraan koordinasi forkompincam di Kecamatan Kebumen	33.691.000	30.622.300	90,89	9 bln	9 bln	100						
Jumlah Kegiatan penyelenggaraapemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	4.848.000	4.817.000	99,36	2 keg	2 keg	100	3.090.000	3.090.000	100,00	2 keg	2 keg	100
Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	4.848.000	4.817.000	99,36	2 keg	2 keg	100	3.090.000	3.090.000	100,00	1 keg	1 keg	100
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	146.290.000	145.101.800	99,19	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100	64.063.000	63.752.000	99,51	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100

Indikator Kinerja	TAHUN 2021						TAHUN 2020					
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah desa/kel yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	28.485.000	28.213.700	99,05	24 desa	24 desa	100	22.000.000	21.874.000	99,43	24 desa	24 desa	100
Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	10.560.000	10.475.100	99,20	2 dok	2 dok	100	4.226.000	4.218.000	99,81	2 dok	2 dok	100
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	18.715.000	18.472.500	98,70	1 jenis	1 jenis	100	-	-	100,00	1 jenis	1 jenis	100
Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	32.810.000	32.494.600	99,04	30 keg	30 keg	100	10.560.000	10.501.000	99,44	30 keg	30 keg	100
Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	46.140.000	45.936.000	99,56	6 keg	6 keg	100	15.027.000	14.942.000	99,43	6 keg	6 keg	100
jumlah desa yang di rekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1.300.000	1.290.000	99,23	24 desa	24 desa	100	3.800.000	3.800.000	100,00	24 desa	24 desa	100
Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel	8.280.000	8.219.900	99,27	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100	8.450.000	8.417.000	99,61	29 Desa/kel	29 Desa/kel	100

3.1.3 Realisasi Anggaran

REALISASI KEUANGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 KECAMATAN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	9.635.000	9.388.800	97,44
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5.450.000	5.256.000	96,44
		Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4.185.000	4.132.800	98,75
		Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.303.618.000	4.306.650.099	81,20
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan Tunjangan	5.289.378.000	4.293.181.699	81,17
		Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	14.240.000	13.468.400	94,58
		Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	49.360.000	48.859.300	98,99
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	7.000.000	6.997.500	99,96
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	10.000.000	9.504.000	95,04
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100,00
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan	3.600.000	3.600.000	100,00
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	19.760.000	19.757.800	99,99
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milih Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	5.500.000	100,00
		Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	5.500.000	5.500.000	100,00
		Jumlah Bulan Penyediaan urusan Pemerintah Daerah	58.531.000	50.647.224	86,53
		Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	1.531.000	1.520.000	99,28
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	16.128.324	67,20
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	33.000.000	32.998.900	100,00
		Jumlah unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	47.950.000	44.657.500	93,13
		Jumlah unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	28.000.000	24.928.500	89,03
		Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.820.000	98,20
		Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya	9.950.000	9.909.000	99,59
		Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	70.710.000	70.500.000	99,70
		Jumlah pelayanan perijinan Non Usaha yang dilaksanakan	8.750.000	8.684.000	99,25
		Jumlah pelayanan Non perijinan yang dilaksanakan	61.960.000	61.816.000	99,77
		Prosentase terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.691.000	30.622.300	90,89
		Jumlah bulan tercukupinya penyelenggaraan koordinasi forkompincam di Kecamatan Kebumen	33.691.000	30.622.300	90,89
		Jumlah Kegiatan penyelenggaraapemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	4.848.000	4.817.000	99,36
		Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	4.848.000	4.817.000	99,36
		Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	146.290.000	145.101.800	99,19
		Jumlah desa/kel yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	28.485.000	28.213.700	99,05
		Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	10.560.000	10.475.100	99,20
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum	18.715.000	18.472.500	98,70
		Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	32.810.000	32.494.600	99,04
Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosmas dan Kepemudaan)	46.140.000	45.936.000	99,56		
Jumlah desa yang di rekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1.300.000	1.290.000	99,23		
Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2Kdes/kel	8.280.000	8.219.900	99,27		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja SKPD Tahun Anggaran 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Dari jumlah total sub kegiatan sebanyak 27 sub kegiatan, 24 kegiatan (88,89%) terlaksana dengan serapan keuangan diatas 90%. 3 kegiatan (11,11%) terlaksana dengan serapan antara 67,20 % s.d 89,03%.

4.2 Permasalahan / Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kebumen tahun 2021 adalah kurangnya personil baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berubah-ubahnya kebijakan yang dikarenakan munculnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan anggaran dan perencanaan, sehingga waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan kegiatan akhirnya tertunda dan bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berkurangnya anggaran dan kebijakan penerapan protokol Kesehatan yang melarang adanya kerumunan orang.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala adalah

- a) Memperlancar proses Ganti Uang sehingga pendanaan kegiatan tercukupi, dengan mendisiplinkan diri untuk mematuhi aliran kas tiap triwulannya.
- b) Sinergi antara PPTK dan Bagian Keuangan/Bendahara sehingga proses Ganti Uang lebih lancar, mematuhi tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga proses penyusunan SPJ bisa tepat waktu dan sesuai target.